

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PATI

Aina Shinta Malinda*¹, Chatila Maharani¹

¹Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang Sekaran, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

*Corresponding author: ainashintamalinda99@gmail.com

ABSTRACT

In Pati Regency, 3,925 children will be affected by stunting in 2021, up from 3,997 in 2020. It has gone down, but not by much. A Pati Official Guideline was issued by the Pati local government to accelerate the reduction of obstructions in order to reduce obstruction rates until the objective is reached in 2023. This study aims to find out how Pati Regency's Regent Regulation number 11 of 2020, which aims to reduce stunting more quickly, will be implemented. The research employs a qualitative methodology. Participants in this study included nutrition officers at the Sukulilo I and II health centers. Data are gathered through in-depth interviews, observation, and documentation by the Head of the Human Development Division at Bapepeda, the Head of the Public Health Division at the Health Service, mothers of stunted toddlers in the two puskesmas areas, and Pati II health centers. This study demonstrates that the rule the district head issued to speed up the reduction of stunting in Pati Regency is working. There are satisfactory categories for communication, resources, attitude, and the structure of the bureaucracy. There is still a lack of community support for the environment.

Keywords: *Implementation, Regent Regulations, Reducing Stunting*

PENDAHULUAN

Kondisi tubuh anak yang pendek menjadi hal yang dianggap remeh oleh banyak orang karena sering dikaitkan dengan faktor keturunan (warisan genetik) dari kedua orang tuanya. Stunting merupakan masalah yang menghambat pembangunan manusia di era global saat ini. Pada tahun 2020, terdapat 149,2 juta anak stunting, turun sebesar 26,7% dari 203,6 juta pada tahun 2000, menurut perkiraan dari *UNICEF* (1). Namun penurunan stunting belum merata di semua daerah. Jumlah anak balita yang menderita stunting akan terus meningkat mencapai

29,3 juta pada tahun 2020 di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Sementara itu, Asia Timur dan Pasifik akan mengalami penurunan terbesar dalam jumlah anak yang mengalami stunting di bawah usia lima tahun. Akan ada 20,7 juta anak yang mengalami stunting di kawasan ini pada tahun 2020. 2,5 juta anak di Eropa Timur dan Asia Tengah di bawah usia lima tahun akan terhambat pada tahun 2020. 5,8 juta anak balita di Amerika Latin dan Karibia akan terkena stunting pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2020, 53,8 juta anak di bawah usia lima tahun di Asia Selatan akan mengalami stunting. Sementara

itu, pada tahun 2020, 7,7 juta anak di Timur Tengah dan Afrika Utara di bawah usia lima tahun akan mengalami stunting (1).

Prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%, seperti yang ditemukan oleh Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Prevalensi inhibisi Indonesia menempati urutan ke-115 dari 151 negara di dunia, menurut JME, data Bank Dunia UNICEF tentang pencegahan tahun 2020. Prevalensi angka di stunting Jawa Tengah sebesar 20,08%, menurut data nasional 2022 dikumpulkan oleh SSGI dan SUSENAS (2). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (3), menyatakan bahwa lebih dari 20% balita pendek dan sangat pendek mengalami masalah kesehatan (stunting). Menurut data Pemantauan Status Gizi Indonesia (4), prevalensi terendah adalah 10,4%, yang menunjukkan bahwa stunting dan gizi buruk kronis masih terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Untuk menurunkan angka kasus stunting di 11 daerah prioritas di Jawa Tengah yaitu diantaranya Kota Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Blora, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonosobo,

Kabupaten Batang dan Kabupaten Kebumen yang setiap kabupaten/kota tersebut harus melakukan upaya yang komprehensif. Dengan angka prevalensi 5,7%, Kabupaten Pati menempati urutan ke-21 dari 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sumber stunting. Dengan 72 kasus, Kabupaten Pati menduduki peringkat 23 dari seluruh kabupaten di Jawa Tengah dalam Penimbangan Serentak 2018 (3). Puskesmas Sukolilo I memiliki persentase balita pendek tertinggi dengan persentase 14,19 persen dari 171 balita yang diukur tinggi badannya di Kecamatan Sukolilo yang tinggal di sana. Dengan persentase 0,28 persen, atau 1 dari setiap 361 balita yang diukur tinggi badannya di Kabupaten Pati, Puskesmas Pati II memiliki jumlah balita yang stunting paling sedikit (5).

Komitmen pemerintah pusat dalam upaya percepatan perbaikan gizi ditunjukkan dengan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah melalui peningkatan partisipasi dan kepedulian stakeholders secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan gizi masyarakat. perbaikan dengan prioritas 1.000 HPK. Di Wilayah Jawa Tengah, upaya percepatan hambatan dijadikan pedoman

untuk membantu meningkatkan nilai sumber daya manusia sebagai bentuk tanggung jawab. Upaya tersebut dilakukan dalam kerangka yang terencana, terarah, dan berkesinambungan dengan mengkoordinasikan program dan kegiatan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui upaya komprehensif lintas sektor dan program serta kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

Untuk mempercepat penurunan stunting terkait fenomena tersebut di Kabupaten Pati, maka Pemerintah Kabupaten Pati menerbitkan Peraturan Bupati Pati nomor 11 Tahun 2020 (19). Pada tahun 2023, tujuan peraturan bupati ini adalah untuk menurunkan angka stunting pada balita di daerah tersebut hingga kurang dari 20%. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (6). Peneliti ingin mengetahui seberapa baik Peraturan Bupati di Kabupaten Pati digunakan untuk menangani kasus stunting dengan latar belakang tersebut.

METODE PENELITIAN

Analisis tematik deskriptif dan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi, dan

dukungan lingkungan masyarakat dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan penurunan stunting. Beberapa informan dalam penelitian stunting antara lain Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di BAPPEDA Kabupaten Pati, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Bagian Gizi Puskesmas Pati II dan Sukolilo I, serta ibu balita stunting di dua wilayah puskesmas tersebut. Dalam penelitian ini, metode pengkodean terbuka dan selektif digunakan. Pengkodean menggunakan Perangkat Lunak Analisis Data Kualitatif Berbantuan Komputer (*CAQDAS*), khususnya *QDA Miner Lite*, yang menggunakan metode pengkodean deduktif dan induktif. Dalam penelitian ini, lima kategori utama koding deduktif adalah komunikasi, sumber daya, birokrasi, disposisi, dukungan lingkungan masyarakat, serta indikator capaian keberhasilan percepatan penurunan stunting. Transmisi, kejelasan, informasi, staf, fragmentasi, kewenangan, birokrat, *SOP*, intensif, fasilitas, dan dukungan lingkungan masyarakat termasuk dalam 11 subkategori. Pengkodean induktif studi ini dipecah menjadi dua subkategori: kendala komunikasi dan sumber daya. Penelitian ini telah mendapatkan izin pelaksanaan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Negeri Semarang dengan Nomor 153/KEPK/EC/2022 dan memenuhi prinsip yang dinyatakan dalam *Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants* dari WHO 2011 dan *International Ethical Guidelines for Health related Research Involving Humans* dari

CIOMS dan WHO 2016. Oleh karena itu, penelitian diatas dapat dilaksanakan dengan selalu memperhatikan prinsip tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut temuan penelitian yang mampu penulis komunikasikan guna menentukan bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pati nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati, Indikator tersebut meliputi:

1. Komunikasi

a. Transmisi

Dengan mempertimbangkan segala kendala yang mungkin ada di lapangan, saluran komunikasi yang efisien harus memastikan bahwa pesannya dipahami oleh pengirim dan penerima. Komunikasi adalah sebuah proses pengiriman informasi di Bappeda menggunakan sosialisasi stunting dan pertemuan untuk menyampaikan pesan kepada pemangku kepentingan lintas sektor (9), khususnya Dinas Kesehatan, berdasarkan temuan penelitian. Dinas Kesehatan kemudian melengkapi data Bappeda dengan data Bappeda kepada seluruh puskesmas di Perda Pati. Selain itu puskesmas di Kabupaten Pati bekerjasama dengan bidan desa untuk melaksanakan program dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Kapasitas petugas puskesmas untuk mendidik dan menyebarkan informasi ke

lingkungan sekitar juga dipengaruhi oleh pengelolaan percepatan pengurangan hambatan di daerah. Komunikasi dengan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dengan masyarakat dan petugas kesehatan di desa terdekat. Upaya Puskesmas dalam program sosialisasi kepada masyarakat di desa tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena, posyandu hanya melakukan sosialisasi ke desa satu kali, dan fakta di lapangan tidak ada kelas balita yang terlaksana. Sulit untuk memberitahu publik tentang sosialisasi karena tidak semua orang ada mau mengikuti program tersebut.

b. Kejelasan

Instruksi harus jelas dan konsisten selama implementasi. Staf pelaksana yang dalam penyampaian pesan tidak jelas dan tidak konsisten, maka akan berdampak pada proses percepatan penurunan angka stunting. Proses komunikasi diarahkan menuju hasil yang maksimal yang dilakukan dengan cara interaksi sosial oleh setiap pemangku kepentingan (8). Puskesmas, Bappeda, dan Dinas Kesehatan secara konsisten telah berkomunikasi dengan baik.

Sosialisasi dan pelatihan yang baik bagi petugas puskesmas untuk mempercepat penurunan stunting telah dilakukan oleh

Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Komunikasi puskesmas yang jelas dan efektif dengan masyarakat sangat mengagumkan.

2. Sumber Daya

a. Staf

Kualitas dan kemampuan staf untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan sangat penting. Karena pemberian sosialisasi secara rutin dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas kepada kader kesehatan di desa dan masyarakat desa setempat dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan program, maka petugas memiliki kompetensi dan pemahaman tentang stunting. Di Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas, tersedia sumber daya staf yang cukup dan kompeten untuk menangani percepatan penurunan stunting. Para staf menghadapi tantangan karena tidak semua orang menerima undangan pertemuan dan pelatihan percepatan pengurangan stunting. Kurangnya penyerapan bahan yang dikirim dipengaruhi oleh hal ini.

b. Informasi

Informasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam implementasi kebijakan. Kejelasan sebaran informasi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati cukup baik dan jelas.

c. Kewenangan

Contoh otoritas termasuk kapasitas untuk memerintah, membuat keputusan, dan mendelegasikan wewenang kepada orang lain. Keberhasilan implementasi kebijakan otoritas bergantung pada pembuatan pilihan yang tepat. Ketika program percepatan penurunan stunting dilaksanakan, para pelaksana memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dan instruksi dari otoritas, khususnya pemerintah. Bappeda memberikan perintah atau kewenangan kepada sektor lain, seperti Dinas Kesehatan, karena dialah yang bertanggung jawab dalam upaya percepatan pencegahan stunting. Karena Dinas Kesehatan (Dinkes) memiliki kewenangan terbesar di bidang kesehatan, maka percepatan upaya penurunan stunting menjadi sangat penting. Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan membawahi Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Puskesmas melaksanakan program penurunan stunting sesuai dengan arahan dan wewenang dari Dinas Kesehatan Kabupaten. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) diberikan kepada staf Puskesmas untuk digunakan dalam pekerjaan mereka.

d. Fasilitas

Kepuasan kerja karyawan secara signifikan dipengaruhi oleh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan fasilitas tempat kerja. Mereka semua dapat berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja karyawan (9). Fasilitas memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan upaya percepatan untuk mengurangi stunting. Proses percepatan penurunan stunting tentunya akan terkendala oleh sarana atau prasarana yang kurang memadai.

Di Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas, ada fasilitas yang baik untuk membantu aksi penurunan stunting lebih cepat berhasil. Namun, sejumlah memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang kurang memadai.

3. Disposisi

a. Komitmen

Disposisi merupakan bentuk dari kualitas sifat demokratis, kejujuran, dan dedikasi (10). Komitmen dan kejujuran petugas merupakan komponen yang paling penting dalam pelaksanaan pengurangan stunting. Anggota staf yang menerapkan kebijakan harus sangat terampil dan berdedikasi. Mungkin sulit menerapkan kebijakan untuk mengurangi stunting lebih cepat jika anggota staf tidak berkomitmen

dan tidak mengikuti instruksi dengan benar. Kejujuran, dedikasi anggota, dan kecepatan penanggulangan stunting, ketiganya sudah cukup memuaskan. Namun, masih kurangnya disiplin dan sosialisasi tepat waktu dengan masyarakat.

4. Birokrasi

a. SOP

Standard Operating Procedure (SOP) struktur birokrasi bertugas mewujudkan kebijakan disposisi. Sumber penting pendukung implementasi kebijakan pemerintah adalah struktur birokrasi yang meliputi pembagian kerja dan *standar operasional prosedur (SOP)* (10). *SOP* yang khusus ditujukan untuk mengurangi stunting belum dibuat oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas.

b. Fragmentasi

Koordinasi atau pembagian tanggung jawab di antara anggota staf di beberapa unit kerja dikenal sebagai fragmentasi. Jika pembagian tanggung jawab dan koordinasi semakin lama, implementasi akan terhambat. Koordinasi dalam batas-batas lembaga ini dikenal sebagai koordinasi internal lembaga. Koordinasi promosi kesehatan, serta koordinasi dengan departemen lain seperti bagian Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan staf di Bagian Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan. Tenaga gizi (ahli gizi) seperti tenaga puskesmas bekerja sama dengan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), kesehatan lingkungan (Kesling), promosi Kesehatan (Promkes) dan bidan puskesmas untuk memastikan lintas sektor di Dinas Kesehatan (Dinkes) dapat bekerja sama dengan baik. Dinyatakan bahwa puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Bappeda berkolaborasi lintas sektor dengan baik.

5. Lingkungan Masyarakat

Dukungan, kritik, dan saran dari masyarakat terkait program percepatan penurunan stunting merupakan contoh dukungan masyarakat. Jika dukungan masyarakat banyak, suatu kebijakan hampir pasti akan dilaksanakan dan bertahan lama. Misalnya, partisipasi masyarakat memuaskan tetapi tidak optimal pada saat sosialisasi yang bertujuan untuk mengurangi stunting.

Tidak bisa dipungkiri masyarakat di Kabupaten Pati mendukung implementasi kebijakan untuk menurunkan stunting lebih cepat. Karena masyarakat desa percaya bahwa stunting merupakan hal yang memalukan bagi desa dan disebabkan oleh kekurangan gizi. Namun, masyarakat di Kecamatan Sukolilo turut menyukseskan program tersebut dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mengikuti anjuran tenaga

kesehatan (Nakes) ketika anak didiagnosis menderita stunting.

Selanjutnya pada pembahasan, model 5 variabel model penerapan kebijakan tersebut. memiliki potensi untuk mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan publik. Meskipun masih terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan Percepatan, namun kebijakan pelaksanaan Perda Kabupaten Pati nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Pati mencakup lima variabel yang berpotensi menentukan keberhasilannya pengganti itu belum maksimum.

1. Komunikasi

Menurut teori Edward III dalam penelitian Nugroho (11) komunikasi merupakan cara kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan sikap serta tanggapan dari mereka yang terlibat. Komponen komunikasi meliputi sosialisasi, advokasi, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam upaya memberikan dukungan perlindungan kepada masyarakat dalam upaya menurunkan prevalensi stunting, sesuai Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting (19).

a. Transmisi

Transmisi komunikasi dari pembuat kebijakan kepada mereka yang menerapkan kebijakan, kelompok sasaran, atau pihak-pihak yang terkait dikenal sebagai transmisi.

(12). Diketahui berdasarkan temuan penelitian ini, pesan dari Bappeda kepada Dinas Kesehatan dan dari Dinas Kesehatan kepada puskesmas sudah cukup untuk implementasi Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan pantauan tidak langsung, masih kurangnya komunikasi antara puskesmas dengan masyarakat Kabupaten Pati yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang stunting dan penolakan terhadap program percepatan penurunan stunting.

b. Kejelasan

Petunjuk pelaksanaan harus jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan sebagai bagian dari dimensi kejelasan agar tidak terjadi salah tafsir (12). Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Stunting bersifat komprehensif dan jelas sebagai pedoman umum implementasi kebijakan ini. Hasil observasi dan wawancara dengan informan memperjelas apa yang disampaikan Bappeda Pati kepada Dinas Kesehatan. Wawancara dengan anggota masyarakat mengungkapkan

bahwa pendekatan puskesmas dalam memberikan informasi kepada masyarakat jelas dan mudah dipahami. Meskipun ada masalah komunikasi yang jelas, klarifikasinya sudah memadai. Misalnya, masih ada beberapa desa yang belum disosialisasikan oleh masyarakat, hal ini menunjukkan belum semua mendapat informasi.

c. Konsistensi

Menurut penelitian Halisah (13) Pemerintah telah menjadikan komitmen ini sebagai regulasi prioritas, dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mempercepat penurunan angka stunting. Konsistensi dalam upaya mengurangi stunting merupakan bagian dari komitmen pemerintah. Konsistensi dalam upaya mengurangi stunting merupakan bagian dari komitmen pemerintah. Kebijakan untuk menurunkan stunting lebih cepat telah konsisten diterapkan di Kabupaten Pati. Perwakilan lintas sektor dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kemenag, Diskominfo, dan DPRD menghadiri atau menghadiri pertemuan yang dijadwalkan secara rutin. Rapat koordinasi, rapat rutin dengan puskesmas, bimtek, pelatihan sosialisasi

melalui media elektronik khususnya melalui grup WA, serta monitoring dan evaluasi menunjukkan konsistensi dari Dinas Kesehatan, demikian wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat DKK Pati. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 yang tertulis, industri pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam hal: Strategi ini meliputi percepatan pencegahan stunting, fasilitasi dalam bentuk koordinasi, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, monitoring, supervisi, evaluasi jaringan kesehatan di tingkat desa atau kelurahan, menempatkan gizi pada urutan teratas dalam daftar prioritas, peningkatan kualitas hidup dan lingkungan yang sehat, dan membuat pelayanan gizi lebih mudah dijangkau (19).

2. Sumber Daya

Karena efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, indikator sumber daya berfokus pada keberhasilan atau kegagalan proses implementasi kebijakan. (14).

a. Staff

Berdasarkan temuan penelitian, SDM yang cukup untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Stunting. SDM Bappeda Pati adalah pakar kesehatan

lingkungan. Di Dinas Kesehatan, tersedia sumber daya untuk semua petugas kesehatan komunitas. Sumber daya puskesmas kemudian memasukkan setiap pegawai terkait gizi. Sumber daya manusia di desa meliputi bidan, tenaga kesehatan, dan perangkat desa. guru PAUD, kader posyandu, Kader bina lingkungan, dan kader lainnya termasuk dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting (19).

b. Informasi

Aksesibilitas informasi sangat penting, Informasi tersebut dapat ditemukan dalam dua kategori, yaitu informasi berupa data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan kejelasan mengenai langkah atau tindakan yang diperlukan (15). Data terkait implementasi kebijakan Dinas Kesehatan memberikan informasi yang memadai. Hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa informasi berbasis data telah diprogramkan.

C. Wewenang

Kekuasaan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan dikenal dengan kewenangan (15). Bappeda bertugas melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pendanaan, program dan lokasi terkait pencegahan stunting konvergensi

sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting (19). Wawancara dengan informan Bappeda menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan kewenangannya secara efektif sesuai dengan peraturan bupati. Berdasarkan Perbup Nomor 11 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting, Dinas Kesehatan memegang kewenangan utama untuk intervensi gizi tertentu. Menurut wawancara dengan informan Dinas Kesehatan, puskesmas telah diberi wewenang untuk melacak dan mengevaluasi kemajuan mereka dalam mengurangi stunting lebih cepat dengan memberikan pedoman kepada mereka. Dari segi wewenang, puskesmas menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya serta memiliki kewenangan penuh dari atasannya.

D. Fasilitas

Sarana dan prasarana dimanfaatkan oleh pelaksana untuk membantu proses pelaksanaan program (16). Fasilitas di Dinas Kesehatan sudah baik. Sarana atau prasarana di Puskesmas Sukolilo 1 dan Pati II sudah memadai. Menurut wawancara dengan ibu balita stunting, fasilitas puskesmas sebenarnya sudah cukup baik. Sarana yang

beroperasi saat ini telah memenuhi persyaratan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting dalam hal sosialisasi, pendampingan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi upaya pencegahan stunting yang dilakukan di tingkat kabupaten dan desa/tingkatan kelurahan (19).

Informan menjelaskan bahwa meskipun fasilitasnya dikatakan cukup baik, namun masih ada beberapa warga mengeluhkan karena timbangan khusus bayi rusak dan belum diganti hingga saat ini. Selain itu, pembagian PMT berupa biskuit untuk balita stunting tidak konsisten serta belum merata.

3. Birokrasi

a. *SOP (Standar Operasional Prosedur)*

Anggota staf dapat melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan standar yang ditetapkan berkat *SOP* (14). Selama proses implementasi di Kabupaten Pati belum ada standar operasional (*SOP*) khusus mengenai pelaksanaan percepatan penurunan stunting, sesuai temuan wawancara yang dilakukan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

4. Disposisi

Disposisi lebih merupakan komitmen daripada kompetensi dan kemampuan dalam

hal kesediaan aktor untuk mengimplementasikan kebijakan (22).

a. Birokrat

Hasil penelitian mengenai implementasi penurunan stunting di Kabupaten Pati dapat disimpulkan bahwa pejabat di Bappeda Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, dan Puskesmas telah melaksanakan percepatan penurunan stunting dengan integritas dan itikad baik. Pegawai Dinas Kesehatan sangat berdedikasi untuk percepatan upaya penurunan stunting, dan ada prestasi yang bisa diraih. Hal ini sejalan dengan ayat 2 pasal 7 Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa program pengurangan hambatan terkait dengan tanggung jawab pemerintah lingkungan dan aparatur provinsi (19). Informan puskesmas menambahkan, surat pertanggungjawaban (SPJ) menjabarkan setiap langkah yang diambil. Semua tindakan di puskesmas dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dan pelaksana melakukan tindakan sesuai yang tertera di SPJ (Surat Pertanggung Jawaban).

b. Intensif

Dalam proses mendeteksi stunting, insentif mengacu pada tanda penghargaan yang dinilai dari kinerja atau tingkat keterampilan pelaksana (17). Menurut

informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, insentif belum diberikan di puskesmas, Dinas Kesehatan, maupun Bappeda. Hal ini disebabkan pelaksana program wajib melaksanakan program penanggulangan stunting tanpa mengharapkan imbalan.

5. Lingkungan Masyarakat

Dalam upaya keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh karakteristik peserta, opini publik, sumber daya ekonomi masyarakat, jaringan pendukung, dan faktor lainnya (18). Menurut wawancara dengan peserta, wilayah Puskesmas Pati II yang memiliki jumlah kasus stunting terendah di Kabupaten Pati masih minim dukungan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting. Pasalnya, daerah tersebut memiliki jumlah kasus stunting yang paling rendah. Sebaliknya, program percepatan penurunan stunting didukung masyarakat di wilayah Puskesmas Sukolilo I Kabupaten Pati yang memiliki jumlah kasus stunting tertinggi. Pengamatan menunjukkan bahwa mereka ingin dididik tentang stunting dan mendapatkan bantuan dari tenaga kesehatan jika anak mereka ditemukan stunting. Namun karena faktor ekonomi dan

kurangnya pendidikan di wilayah Puskesmas Sukolilo I, kasus stunting masih relatif tinggi di Kabupaten Pati. Menurut Dinas Kesehatan, terdapat oknum di Kabupaten Pati yang mendukung dan menentang program stunting karena alasan lingkungan. Namun, pelaksana program percepatan penurunan stunting tetap mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan masyarakat meskipun mendapat kritik atau penolakan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian di lapangan tentang implementasi Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Pati dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Melalui pertemuan rutin lintas sektoral, pelibatan masyarakat, dan pelatihan tenaga kesehatan, Perbup Pati tentang Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pati dapat disosialisasikan untuk diimplementasikan. Dalam hal sosialisasi ke Puskesmas, Puskesmas melakukan sosialisasi masyarakat lebih buruk dari Dinas Kesehatan. Puskesmas memberikan informasi yang jelas namun tidak sempurna kepada masyarakat, sedangkan dinas kesehatan memberikan informasi yang jelas kepada puskesmas. sosialisasi yang

dilaksanakan di Puskesmas tidak konsisten dan hanya sekali dalam sebulan.

2. Di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, staf memiliki akses sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan Perda Kabupaten Pati tentang Percepatan Penanganan Stunting. Informasi yang diterima staf sudah jelas dan memadai. Namun masih terdapat kekurangan informasi berupa data puskesmas. Meskipun infrastruktur dan fasilitas yang digunakan sangat baik, beberapa di antaranya masih belum memadai.

3. Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan implementasi untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati baik di puskesmas dan Dinas Kesehatan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa anggota pelaksana yang terlambat untuk menjangkau masyarakat. Selain itu, pegawai puskesmas dan dinas kesehatan yang berprestasi di atas target capaian tidak diberikan penghargaan.

4. Perbup Pati tentang Percepatan Penanggulangan Stunting belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya birokrasi. Pasalnya, baik dinas kesehatan maupun puskesmas tidak memiliki SOP khusus untuk mengatasi penurunan stunting

secara cepat. Namun, proses implementasi tidak terhalang oleh fragmentasi yang ada.

5. Lingkungan masyarakat belum memberikan dukungan terbaik terhadap Perbup Pati untuk percepatan penurunan stunting. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang tidak mau melakukan apapun untuk menghentikan stunting di wilayahnya dan masyarakat tidak membantu mempercepat proses penurunan stunting.

SARAN

Untuk penelitian ini, peneliti menyarankan agar Bappeda Kabupaten Pati menyusun standar operasional (SOP) khusus untuk percepatan penurunan stunting serta membentuk kader pembangunan manusia bidang kesehatan di setiap desa minimal satu orang guna mendukung program penanganan kasus stunting secara cepat. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati harus memperbaiki penyajian data stunting dan memprioritaskan intervensi program penurunan stunting untuk wilayah tertentu. Agar puskesmas dapat melakukan pengukuran tumbuh kembang balita secara tepat, mendistribusikan PMT ke seluruh balita stunting, dan membekali kader kesehatan di desa dengan pelatihan dan perbekalan khusus. Peneliti lain yang telah melakukan penelitian serupa tentang implementasi kebijakan stunting di lokasi

lain dapat memahami secara menyeluruh komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan, dan faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. unicef. *Jumlah Balita Stunting di Dunia Menurun , tapi Tak Merata*. Published online 2021:2021.
2. Bina D, Daerah P, Dalam K, Republik N. **MENDUKUNG PERCEPATAN**. Published online 2022.
3. Dinkes Provinsi Jateng. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. *J Chem Inf Model*. Published online 2019:1–156.
4. Kemenkes. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. *Kemenkes*. Published online 2023:1–7.
5. Kemenkes RI. Buku Saku Pemantauan Status Gizi. *Buku Saku*. Published online 2017:1–150.
6. DKK Pati. Profil kesehatan kabupaten pati tahun 2018. *Pati Dinas Kesehat Kabupaten Pati*. 2018;(0295):36–37.
7. Pemerintah Kabupaten Pati. *Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Pati; 2020.
8. Edward III GC. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press;

1980. indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (indikator 8: kesehatan jiwa) di kota depok tahun 2018. 2018;07(02):64–73.
9. Komunikasi AP, Wilmot W, Sereno KK. 1. komunikasi antar budaya. Published online 2012:1–6.
 10. Amin MAS. Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial. *J Common.* 2017;1(2). doi:10.34010/common.v1i2.573
 11. Pangarso A, Fajar Firdaus F, K. Moeliono N. O L U O Mo R. *Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Div Sumber Daya Mns dan Diklat PT Dirgant Indones.* 2016;12:50–62.
 12. Struktur DAN, Terhadap B, Sabatier PA, Meter V, Horn V. IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL DASAR NEGERI DI KECAMATAN TAMBAK Mening Subekti , Muslih Faozanudin , Ali Rokhman Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman PENDAHULUAN Implementasi kebijakan publik merupakan salah sat. 2017;3:58–71.
 13. Nugroho R. *Public Policy.* Elek Media Kompetindo; 2017.
 14. Dengan S, Keluarga P. Analisis persiapan implementasi program
 15. Halisah UN, Irawati I, Yuliastina R. 2019 Concerning the Acceleration of Stunting. 2020;15:25–37.
 16. Carolina N. Implementasi Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Published online 2019:38–51.
 17. Kartawidjaja D. *Kebijakan Publik Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.* Alfabeta; 2018.
 18. Winarno B. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus.* CAPS; 2014.
 19. Hasibuan M. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* PT Bumi Aksara; 2011.
 20. Sunaryo DR, Candradewini, Arifianti R. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. *Pemikir Dan Penelit Bid Adm Sos Hum Dan Kebijak Publik.* 2022;4:205–213. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.u>

npad.ac.id/responsive/article/downlo
d/34716/17260&ved=2ahUKEwjf_d
O3rJD4AhXORmwGHXpVD7QQFn
oECAgQAQ&usg=AOvVaw0Gn4Gd
tMpzF_XRiyC8r6uO

